

---

---

## Identifikasi Hambatan dan Manfaat Pelaksanaan *E-Procurement* Pada Pemerintahan Timor-Leste

**Desni Mariani Oematan,**

Dili Institute of Technology

Email korespondensi: desnioematan@gmail.com

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan, termasuk penerapan e-procurement. Timor-Leste, sebagai negara yang relatif baru merdeka, menghadapi banyak tantangan dalam pembangunan infrastrukturnya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebelum adanya e-procurement, proses pengadaan di Timor-Leste sering kali diwarnai oleh berbagai masalah seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya transparansi, dan potensi korupsi. E-procurement diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan manfaat pelaksanaan e-procurement di pemerintahan Timor-Leste. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber dari jurnal, buku, dan laporan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste menghadapi beberapa hambatan, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan dan keterampilan teknis bagi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat. Meskipun demikian, e-procurement juga menawarkan sejumlah manfaat signifikan, seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi dalam proses pengadaan, serta pengurangan biaya operasional. Studi ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan e-procurement. Berdasarkan kesimpulan disarankan untuk dilaksanakan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas implementasi e-procurement pada semua bidang di wilayah Timor Leste.

**Kata Kunci:** *e-procurement; efektivitas; transparansi; akuntabilitas; Timor-Leste.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pemerintahan. Salah satu inovasi penting yang muncul adalah sistem e-procurement, yang merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. E-procurement diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Timor-Leste, mulai mengadopsi sistem ini dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam sistem pengadaan konvensional. Timor-Leste, sebagai negara yang relatif baru merdeka, menghadapi banyak tantangan dalam pembangunan infrastrukturnya, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa. Sebelum adanya e-procurement, proses pengadaan di Timor-Leste sering kali diwarnai oleh berbagai masalah seperti birokrasi yang berbelit, kurangnya transparansi, dan potensi korupsi (Hertati et al., 2021). Oleh karena itu, pemerintah Timor-Leste mulai mengimplementasikan e-procurement dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengadaan yang ada dan mendorong praktik pengadaan yang lebih baik dan efisien.

Implementasi e-procurement di Timor-Leste juga merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memperbaiki citra administrasi publiknya.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, e-procurement diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pengadaan secara lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan komitmen Timor-Leste untuk meningkatkan integritas dan mengurangi korupsi dalam sektor publik. Selain itu, pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste dapat memberikan dampak positif pada iklim investasi. Dengan proses pengadaan yang lebih transparan dan efisien, para investor, baik domestik maupun asing, akan memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lingkungan bisnis di Timor-Leste. Hal ini pada gilirannya dapat menarik lebih banyak investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara tersebut (Pardede, 2023).

Namun, meskipun memiliki banyak potensi manfaat, pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste tidak lepas dari berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah, serta resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi dan diatasi agar pelaksanaan e-procurement dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan e-procurement juga sangat signifikan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pemerintahan. Dengan memahami baik hambatan maupun manfaat dari pelaksanaan e-procurement, pemerintah Timor-Leste dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sistem ini dan mengatasi berbagai tantangan yang ada (A. H. Putri et al., 2024).

Di sisi lain, penerapan e-procurement memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung. Keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman terhadap sistem e-procurement, menjadi salah satu tantangan utama. Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai menjadi kunci dalam mengatasi hambatan ini. Selain itu, ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil dan akses ke perangkat elektronik, juga merupakan prasyarat penting yang harus dipenuhi (Kadarisman, 2024). Regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan e-procurement juga perlu diperkuat. Pemerintah Timor-Leste perlu mengembangkan kerangka kerja hukum yang jelas dan tegas untuk mengatur seluruh proses pengadaan secara elektronik. Ini termasuk aturan mengenai keamanan data, privasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, diharapkan pelaksanaan e-procurement dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Inverardi et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta manfaat pelaksanaan e-procurement dalam pemerintahan Timor-Leste. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi e-procurement, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya keterampilan teknis pegawai. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi manfaat potensial yang ditawarkan oleh e-procurement, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah Timor-Leste dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengoptimalkan penggunaan e-procurement untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

---

---

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta manfaat pelaksanaan e-procurement dalam pemerintahan Timor-Leste. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang sudah ada, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan publikasi lainnya yang relevan. Pendekatan ini dianggap sesuai mengingat keterbatasan akses terhadap data lapangan dan kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif (Abdussamad, 2021). Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengumpulkan literatur yang relevan dengan topik e-procurement. Sumber-sumber ini diidentifikasi melalui pencarian database akademik, perpustakaan digital, dan situs web resmi pemerintah serta organisasi internasional.

Setelah literatur terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan dengan metode konten, di mana setiap sumber dipelajari secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan dan manfaat pelaksanaan e-procurement. Tema-tema ini kemudian dikategorikan dan disintesis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi e-procurement di Timor-Leste. Proses ini melibatkan pembacaan kritis dan penilaian terhadap argumen serta temuan dari setiap sumber (Hermawan, 2019). Terakhir, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan hambatan dan manfaat pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste secara terperinci. Narasi ini dilengkapi dengan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat membantu pemerintah Timor-Leste dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengatasi hambatan yang ada dan memaksimalkan manfaat e-procurement. Penelitian ini juga memberikan saran untuk penelitian lanjutan yang dapat memperdalam pemahaman mengenai implementasi e-procurement di berbagai konteks.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hambatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintahan Timor-Leste

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan e-procurement di Timor-Leste adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Di banyak wilayah di Timor-Leste, masih memiliki akses yang terbatas. Keberadaan jaringan internet yang tidak merata dan sering kali tidak dapat diandalkan menghambat kemampuan sistem e-procurement untuk berfungsi secara optimal. Selain itu, perangkat keras yang digunakan dalam pemerintahan sering kali sudah usang atau tidak memadai, yang dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas sistem e-procurement. Tanpa dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, proses pengadaan elektronik tidak dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Hal ini sebagaimana yang tertuang pada (Harjito et al., 2014) yang menyatakan bahwa kesuksesan system informasi suatu perusahaan tergantung pada bagaimana system ini dijalankan, kemudahan system itu bagi para penggunanya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan. Hambatan lain yang signifikan adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan teknis di kalangan pegawai pemerintah. Banyak pegawai yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan sistem e-procurement secara efektif. Kurangnya pelatihan yang komprehensif dan pendidikan lanjutan tentang penggunaan sistem ini menyebabkan mereka kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih baik dan program pengembangan keterampilan perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa pegawai dapat memanfaatkan e-procurement secara maksimal dan efektif (Wardhani et al., 2021).



Resistensi terhadap perubahan merupakan hambatan signifikan dalam implementasi e-procurement di Timor-Leste. Banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, seperti pejabat pemerintah dan penyedia barang dan jasa, merasa enggan untuk meninggalkan metode pengadaan konvensional yang sudah mereka gunakan selama ini. E-procurement telah mempercepat proses pengadaan, menghilangkan kebutuhan pertemuan tatap muka antara panitia dan calon penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tersebut (Nurchana et al., 2014). Ketidakpercayaan terhadap sistem baru dan ketidakpastian mengenai efektivitas e-procurement dapat menambah hambatan dalam proses adaptasi. Resistensi ini sering kali muncul karena kekhawatiran akan kesulitan dalam transisi dan ketidakpastian tentang hasil dari perubahan yang dilakukan. Kekurangan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan e-procurement juga menjadi hambatan penting. Sistem hukum dan kebijakan yang ada mungkin belum sepenuhnya disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan dan tantangan e-procurement. Masalah hukum seperti perlindungan data dan privasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa, mungkin belum diatur dengan jelas dalam regulasi yang ada. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi pelaksanaan e-procurement. Reformasi kebijakan dan penguatan kerangka hukum diperlukan untuk memastikan bahwa e-procurement dapat diterapkan dengan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ((R. T. W. Putri & Marzuki, 2024).

Keterbatasan akses dan sumber daya juga berperan dalam menghambat implementasi e-procurement. Banyak daerah di Timor-Leste yang masih mengalami kendala dalam hal aksesibilitas teknologi dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung e-procurement. Ketidakcukupan sumber daya ini mencakup kurangnya perangkat teknologi yang memadai dan anggaran yang terbatas untuk investasi dalam teknologi informasi. Tanpa akses yang memadai dan sumber daya yang cukup, upaya untuk menerapkan e-procurement akan menghadapi tantangan yang signifikan. Kendala terkait keterbatasan akses informasi juga dapat diatasi oleh e-procurement. Platform ini menyediakan akses terbuka dan real-time terhadap semua informasi terkait pengadaan, menggantikan dokumen fisik yang sulit diakses. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga mempermudah aksesibilitas informasi bagi semua pihak yang berkepentingan (Hapiah, 2011). Masalah lain yang sering dihadapi adalah kualitas data dan sistem informasi yang ada. Data yang digunakan dalam sistem e-procurement haruslah akurat dan terintegrasi dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, di Timor-Leste, kualitas data sering kali tidak konsisten dan sistem informasi yang ada mungkin tidak sepenuhnya terintegrasi. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam proses pengadaan dan mengurangi keefektifan e-procurement. Peningkatan sistem informasi dan pengelolaan data yang lebih baik menjadi penting untuk mendukung implementasi e-procurement (Megayanti & Hendriyati, 2021).

Komunikasi dan koordinasi yang buruk antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengadaan juga menjadi hambatan. Dalam banyak kasus, kurangnya komunikasi yang efektif antara departemen pemerintah, penyedia, dan stakeholder lainnya dapat menghambat proses implementasi e-procurement. Koordinasi yang tidak baik dapat menyebabkan kebingungan, kesalahan, dan keterlambatan dalam proses pengadaan. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pihak menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua elemen dari sistem e-procurement berfungsi secara harmonis (Zuhri & Sofia Ulfa Arrofi U, 2023). Ketidakstabilan politik dan ekonomi di Timor-Leste dapat mempengaruhi pelaksanaan e-procurement. Situasi politik yang tidak stabil dan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan proyek e-procurement dan mempengaruhi komitmen untuk

---

---

investasi dalam teknologi. Ketidakpastian ini dapat menghambat upaya untuk memperkenalkan dan mengadopsi e-procurement secara luas, sehingga memperlambat kemajuan yang diharapkan. Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik akan mendukung implementasi dan pengembangan sistem e-procurement secara lebih efektif (Silaban et al., 2013).

### **Manfaat Pelaksanaan E-procurement di Pemerintahan Timor-Leste**

Salah satu manfaat utama dari pelaksanaan e-procurement adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan sistem e-procurement, seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman tender hingga pemilihan penyedia, dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses secara publik. Ini memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait, sehingga mengurangi peluang untuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan transparansi yang lebih besar, setiap tahap proses pengadaan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya meningkatkan akuntabilitas pejabat pemerintah dan memastikan bahwa keputusan pengadaan dibuat berdasarkan kriteria yang objektif dan terukur (Yusni, 2022). E-procurement juga menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi proses pengadaan. Sistem ini mengotomatisasi banyak tahapan dalam proses pengadaan yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pendaftaran penyedia, pengajuan penawaran, dan evaluasi tender. Dengan otomatisasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pengadaan dapat dikurangi secara drastis, memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan lebih cepat. Proses yang terautomasi mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan memastikan bahwa prosedur diikuti dengan lebih konsisten, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan (Bosio et al., 2023).

Penggunaan e-procurement dapat menghasilkan penghematan biaya operasional yang signifikan bagi pemerintah. Proses pengadaan tradisional sering kali melibatkan banyak biaya administratif, termasuk biaya cetak dokumen, pengiriman, dan pengelolaan arsip fisik. Dengan e-procurement, banyak dari biaya ini dapat dihilangkan karena seluruh proses dilakukan secara elektronik. Penghematan ini tidak hanya mencakup biaya langsung yang terkait dengan proses pengadaan, tetapi juga pengurangan dalam biaya yang terkait dengan penanganan dan penyimpanan dokumen serta pengurangan jumlah waktu yang dihabiskan oleh pegawai untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif. E-procurement membuka peluang bagi lebih banyak pemasok untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Dengan adanya platform elektronik, penyedia barang dan jasa dari berbagai lokasi dapat dengan mudah mengakses informasi tentang tender dan mengajukan penawaran tanpa harus hadir secara fisik. Ini menghilangkan batasan geografis dan memungkinkan pemasok kecil dan menengah, yang sebelumnya mungkin tidak memiliki akses ke proses pengadaan, untuk ikut serta. Peningkatan akses ini meningkatkan kompetisi di pasar, yang dapat menghasilkan penawaran yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif untuk pemerintah.

Dengan meningkatkan kompetisi dan aksesibilitas, e-procurement dapat juga berkontribusi pada peningkatan kualitas barang dan jasa yang diperoleh oleh pemerintah. Pemasok yang lebih banyak dan lebih beragam cenderung menawarkan solusi yang lebih inovatif dan berkualitas tinggi untuk bersaing dalam tender. Sistem e-procurement sering kali dilengkapi dengan fitur evaluasi dan peringkat yang memungkinkan pemerintah untuk memilih penyedia berdasarkan kriteria kualitas yang jelas, bukan hanya harga terendah. Ini memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh memenuhi standar yang diharapkan dan memberikan nilai yang lebih baik bagi pemerintah (Faisal et al., 2017). E-procurement juga mempermudah

proses pengawasan dan audit. Semua transaksi dan kegiatan pengadaan dicatat secara elektronik, yang menyediakan jejak audit yang lengkap dan mudah diakses. Hal ini memudahkan auditor dan pengawas untuk meninjau dan memverifikasi proses pengadaan, memastikan bahwa semua langkah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan kemudahan dalam pengawasan, pemerintah dapat lebih cepat mendeteksi dan mengatasi potensi masalah atau penyimpangan dalam proses pengadaan (Wardhani et al., 2021).

Dengan e-procurement, risiko yang terkait dengan proses pengadaan dapat dikelola dengan lebih baik. Sistem ini memungkinkan pemantauan dan analisis data secara real-time, yang membantu dalam identifikasi potensi masalah atau risiko yang mungkin muncul selama proses pengadaan (Hapih, 2011). Misalnya, sistem dapat mendeteksi penawaran yang tidak wajar atau kesalahan dalam dokumen yang diajukan. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara proaktif, e-procurement membantu menjaga integritas dan efektivitas proses pengadaan. E-procurement juga dapat meningkatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah. Dengan sistem terpusat, informasi tentang pengadaan dapat dibagikan dengan mudah antar departemen dan lembaga yang berbeda. Ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta mempermudah proses berbagi informasi dan sumber daya. Kolaborasi yang lebih baik antara instansi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan pengadaan di seluruh pemerintah dipenuhi dengan cara yang konsisten dan terkoordinasi (Hapih, 2011).

### **Strategi dan Rekomendasi untuk Mengatasi Hambatan dan Memaksimalkan Manfaat E-procurement**

Untuk mengatasi hambatan terkait infrastruktur teknologi, pemerintah Timor-Leste perlu melakukan investasi yang signifikan dalam meningkatkan jaringan internet dan memperbarui perangkat keras. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah-daerah terpencil yang masih memiliki akses terbatas, serta meningkatkan kecepatan dan stabilitas koneksi internet (Pranando & Chaniago, 2023). Selain itu, perlu adanya investasi dalam perangkat keras modern yang dapat mendukung sistem e-procurement dengan lebih baik, termasuk server, komputer, dan perangkat jaringan yang canggih. Penyediaan infrastruktur yang memadai akan memastikan bahwa sistem e-procurement dapat berfungsi secara optimal dan meningkatkan keandalan serta efektivitas proses pengadaan (Mamuriyah et al., 2024). Untuk mengatasi kurangnya keterampilan dan pengetahuan di kalangan pegawai pemerintah, penting untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan yang komprehensif. Program pelatihan ini harus mencakup tidak hanya penggunaan teknis sistem e-procurement, tetapi juga pemahaman tentang prosedur dan kebijakan pengadaan yang berlaku. Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan mencakup seluruh level pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan. Pengembangan keterampilan harus diikuti dengan dukungan berkelanjutan, seperti pusat bantuan dan sumber daya online, untuk memastikan bahwa pegawai dapat mengatasi masalah yang mungkin timbul dan terus memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi (Salupra, 2020).

Reformasi kebijakan dan regulasi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan e-procurement. Pemerintah perlu memperbarui dan memperkuat kerangka hukum yang mengatur sistem e-procurement, termasuk perlindungan data dan privasi. Ini mencakup pembuatan undang-undang yang jelas mengenai pengelolaan data elektronik, keamanan siber, dan

mekanisme penyelesaian sengketa. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi e-procurement dengan sistem pengadaan lainnya dan memastikan bahwa peraturan yang ada tidak menjadi penghalang bagi adopsi teknologi baru (Nurlukman, 2018). Dengan kebijakan yang solid, pelaksanaan e-procurement akan lebih mudah, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Mengatasi resistensi terhadap perubahan merupakan tantangan penting dalam implementasi e-procurement. Strategi untuk mengatasi hambatan ini termasuk meluncurkan kampanye sosialisasi yang mengedukasi semua pemangku kepentingan tentang manfaat e-procurement dan bagaimana sistem ini akan mempengaruhi pekerjaan mereka secara positif. Keterlibatan pemangku kepentingan dari tahap awal, termasuk dalam perencanaan dan implementasi, juga dapat membantu mengurangi resistensi. Penting untuk mempromosikan budaya organisasi yang mendukung inovasi dan perubahan, dengan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap teknologi baru dan mendorong pegawai untuk beradaptasi dengan sistem yang ada.

Strategi lain untuk memaksimalkan manfaat e-procurement adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah. E-procurement memerlukan integrasi dan kerjasama yang efektif antara berbagai departemen dan lembaga untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan lancar. Pembentukan tim lintas departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memantau sistem e-procurement dapat membantu dalam mengatasi masalah koordinasi. Selain itu, pengembangan protokol komunikasi yang jelas dan rutin untuk berbagi informasi terkait pengadaan akan memastikan bahwa semua pihak terkait selalu mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Terakhir, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan e-procurement, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan berkala. Penilaian secara rutin tentang efektivitas sistem e-procurement, termasuk identifikasi dan penanganan masalah yang muncul, sangat penting untuk menjaga kinerja system (Saidah et al., 2024). Pemerintah harus menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan e-procurement dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan harapan. Dengan evaluasi dan pemantauan yang konsisten, pemerintah dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dan mengadaptasi sistem e-procurement sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan e-procurement di Pemerintahan Timor-Leste menghadapi sejumlah hambatan utama, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi, kekurangan keterampilan dan pengetahuan pegawai, resistensi terhadap perubahan, serta kekurangan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung sistem ini. Hambatan-hambatan ini menghambat efektivitas dan keberhasilan implementasi e-procurement, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi proses pengadaan. Namun, manfaat yang diperoleh dari e-procurement, seperti peningkatan transparansi, efisiensi, penghematan biaya, dan akses yang lebih luas bagi pemasok, memberikan dorongan kuat untuk terus mengembangkan dan menerapkan sistem ini dengan baik. Peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan pegawai, reformasi kebijakan, dan upaya mengatasi resistensi terhadap perubahan merupakan langkah-langkah kunci yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan dan memaksimalkan manfaat e-procurement.

Untuk mendukung implementasi e-procurement yang sukses, disarankan agar pemerintah Timor-Leste fokus pada beberapa strategi utama. Pertama, perlu adanya investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan pegawai untuk memastikan sistem berfungsi dengan optimal. Kedua, reformasi kebijakan dan regulasi harus dilakukan untuk

mendukung adopsi dan pengelolaan e-procurement dengan lebih baik. Ketiga, penting untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan melalui sosialisasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Terakhir, evaluasi dan pemantauan berkala perlu dilakukan untuk memastikan sistem e-procurement terus berfungsi secara efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan e-procurement dapat memberikan manfaat maksimal dan meningkatkan kualitas serta efisiensi proses pengadaan di Timor-Leste.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Bosio, E., Hayman, G., & Dubosse, N. (2023). The Investment Case for E-Government Procurement: A Cost-Benefit Analysis. *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 14, 81–107. <https://doi.org/10.1017/bca.2023.10>
- Cahyadi, M., & Khairil, M. (2024). Implementasi Kebijakan E-Procurement Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Prinsip Good Univeristy Governance Di Universitas Tadulako. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 671–684. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.737>
- Faisal, M., Paruntu, Y., & Warka, I. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfaslanal. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 1, 1–26. <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/137>
- Hapiah. (2011). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT GOVERNMENT) DI PROVINSI JAWA BARAT Analysis of The Implementation of E-Procurement Government Policy in The Diskominfo of West Java Province. *Jurnal Ilmu Administrasi +*, VIII(1), 49.
- Harjito, Achyani, Y., & Payamta, F. (2014). *Implementasie-Procurement Ditinjau Dari. November*. <http://lpse.surakarta.go.id/eproc/>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Hertati, L., Asmawati, A., & Widiyanti, M. (2021). Peran sistem informasi manajemen di dalam mengendalikan operasional badan usaha milik daerah. *Insight Management Journal*, 1(2), 55–67. <https://doi.org/10.47065/imj.v1i2.28>
- Inverardi, P., Migliarini, P., & Palmiero, M. (2023). Systematic review on privacy categorisation. *Computer Science Review*, 49, 100574. <https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2023.100574>
- Kadarisman, M. R. (2024). Implementation Analysis of E-Procurement in Increasing Small and Medium Enterprise Participation in Malang Regency. *Awang Long Law Review*, 6(2), 399–404. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1177>
- Mamuriyah, N., Prasetyo, S. E., & Sijabat, A. O. (2024). Rancangan Sistem Keamanan Jaringan dari serangan DDoS Menggunakan Metode Pengujian Penetrasi. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(1), 162–167. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i1.1124>
- Megayanti, A., & Hendriyati, P. (2021). Integrasi E-procurement Pada Aplikasi SAP Krakatau Bandar Samudera Menggunakan Service Oriented Architecture. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 2(1 Juni), 17–38. <https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.298>
- Nurchana, R. A. A., Haryono, S. B., & Adiono, R. (2014). EFEKTIVITAS E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jap*, 2(2),

355–359.

- Nurlukman, A. D. (2018). e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264>
- Pardede, M. (2022). Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia (Suatu upaya peningkatan iklim daya saing investasi). *Jurnal penelitian hukum De Jure*, 23(2).
- Pranando, Y. H., & Chaniago, G. W. (2023). Kemampuan SDM Pengguna Terhadap Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 1(1), 1–8.
- Putri, A. H., Cahyo, D., Nugroho, M., Hata, M., Fadilah, M. Z., Farhan, R., Septrian, R., & Furnamasari, Y. F. (2024). PERAN PENDIDIKAN PANCASILA TERHADAP DIGITALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA. 5(2), 2610–2618.
- Putri, R. T. W., & Marzuki, M. Y. (2024). Implementasi Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(4).
- Saidah, S. N., Ningtyas, S. S., Sari, P. P., & Purwoko, S. D. (2024). Analisis Penerapan Metode E-Purchasing pada Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 121–126. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.908>
- Salupra, Y. (2020). Evaluasi Pelaksanaan E-Tendering Pada Unit Layanan Pengadaan Daerah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(1), 46–67. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i1.1166>
- Silaban, P. H., Fila, A., Saragih, S., Peranginangin, C., Manalu, P., & Silalahi, C. F. D. (2013). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA NEWS COVID-19 ON THE DECREASE OF TOURISM ACTIVITIES IN MEDAN CITY IN THE SOCIAL ECONOMIC ASPECTS OF THE COMMUNITY. 297–304.
- Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>
- Yusni, Y. (2022). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 138–148. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i2.219>
- Zuhri, S., & Sofia Ulfa Arrofi U. (2023). Strategi Penerapan Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Pt. Pertagas Niaga Tahun 2018. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 2(2), 80–90. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5906>